

# Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik

Civic Education Perspective Journal

Vol. 5 No. 1 (2025)



online-journal.unja.ac.id/cepj/index



Pandu Pamungkas<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Author:* pandupamungkass@gmail.com

---

## Article Info

*Article history:*

*Received:* 11-02-2025

*Revised:* 03-03-2025

*Accepted:* 22-04-2025

## Kata Kunci:

*Etika*

*Integritas Publik*

*Pemerintahan*

*Transparansi*

*Akuntabilitas*

## Abstrak

Etika administrasi memegang peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika administrasi dalam memperkuat integritas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai utama seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme sebagai fondasi tata kelola yang baik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi etika administrasi sangat bergantung pada efektivitas pengawasan, kejelasan regulasi, serta komitmen moral dari para pemimpin dan aparatur sipil negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas publik tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga pembentukan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai etika dan berorientasi pada pelayanan publik.

---

## Keywords:

*Ethics*

*Public Integrity,*

*Governance,*

*Transparency,*

*Accountability*

## Abstract

Administrative ethics plays a strategic role in fostering a clean, transparent, and integrity-driven government. This study aims to examine the application of administrative ethics principles in strengthening public integrity and enhancing public trust in government institutions. Using a qualitative approach through a literature review, the study identifies key values such as honesty, responsibility, justice, and professionalism as foundational to good governance. The findings indicate that the effective implementation of administrative ethics depends on robust oversight, clear regulations, and strong moral commitment from leaders and civil servants. This study concludes that reinforcing public integrity requires not only a solid legal framework but also the development of an ethical work culture oriented toward public service.

---

## Pendahuluan

Administrasi publik memainkan peran penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah kerumitan tugas tersebut, etika administrasi menjadi dasar utama untuk diartikan bahwa setiap keputusan serta tindakan yang diputus sesuai dengan nilai moral serta kepentingan masyarakat. Integritas publik, sebagai bagian penting dari etika administrasi publik, berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Tulisan ini akan membahas keterkaitan antara etika administrasi dan integritas publik, serta pentingnya implementasi keduanya dalam

sektor pemerintahan. Dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dipercayakan oleh instansi, para pejabat publik perlu memiliki komitmen yang kuat, terutama dalam mengimplementasikan etika dalam administrasi publik. Adanya tantangan dalam praktik administrasi publik, salah satunya adalah tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat publik, yang tentu saja memengaruhi pencapaian integritas publik (Santoso et al., 2024).

Untuk mencapai integritas publik, dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam suatu lembaga publik, dengan menanamkan prinsip-prinsip etika dalam proses administrasi. Etika dalam penyelenggaraan administrasi publik harus menjadi acuan dan norma yang mengatur tingkah laku para pegawai (Andersson & Heywood, 2009; Onwujekwe et al., 2019; Truong, 2020; Woessmann, 2016). Dalam pelaksanaannya, lembaga publik berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan para pejabat publik bisa menampilkan sikap dan tindakan yang merefleksikan nilai-nilai etika yang baik. Jika para pegawai pemerintahan mampu menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip etika dalam sistem administrasi publik, maka tugas-tugas yang mereka laksanakan akan berjalan dengan baik dan membantu dalam mencapai integritas publik (Andersson & Heywood, 2009; Onwujekwe et al., 2019; Overend, 2015; Owusu et al., 2019; Tanny & Al-Hossienie, 2019; Truong, 2020; Woessmann, 2016). Di samping itu, ini juga dapat membangun karakter individu untuk menjadi lebih bertanggung jawab, sopan, disiplin, serta memiliki dedikasi yang tinggi.

Permintaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu diimbangi dengan perbaikan sistem pelayanan yang berkualitas agar dapat memberikan layanan maksimal kepada warga. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan tidak ada gap yang terjadi antara standar yang telah ditetapkan dan kualitas layanan yang diberikan oleh aparat kepada masyarakat. Menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien adalah tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh aparatur sebagai pejabat publik untuk memenuhi hak masyarakat dalam berbagai jenis layanan, baik barang maupun jasa, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (Mvunabandi, 2023; Tweedie & Luzia, 2023; Zakaria & Zaharrudin, 2020). Untuk mencapai integritas publik, sangat krusial untuk menekankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang menjadi acuan dalam bertindak, sehingga layanan publik yang maksimal dapat terwujud.

Menurut Cooper (2012) etika administrasi publik mencakup nilai-nilai moral yang diterapkan dalam proses pengelolaan administrasi untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan adil. Integritas publik, di sisi lain, didefinisikan oleh Huberts (2014) sebagai kualitas utama yang menekankan pada kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam menjalankan fungsi publik. Dengan kata lain, integritas publik menjadi cerminan langsung dari sejauh mana etika diterapkan dalam praktik administrasi. Dalam praktiknya, hubungan antara etika administrasi publik dan integritas publik terlihat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat (Baird, 2016; Housego & O'Brien, 2012; May Ng et al., 2022; Nguyen et al., 2017). Etika memberikan kerangka kerja normatif yang membantu pejabat publik memahami batasan-batasan moral dalam bertindak. Ketika nilai-nilai etika tersebut diterapkan secara konsisten, maka integritas publik dapat terwujud, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, tantangan dalam mengintegrasikan etika dan integritas publik masih sering ditemukan, seperti praktik korupsi, penyalahgunaan

wewenang, dan rendahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya etis dalam administrasi publik melalui pelatihan, regulasi, dan pengawasan yang efektif.

Pemerintah Indonesia melaksanakan sejumlah langkah untuk mewujudkan kejujuran publik, yang diyakini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan. Pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku administrasi publik menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat (Andersson & Heywood, 2009; Jain, 2001; UNEP, 2018). Untuk itu, etika memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai integritas publik. Dalam pengertian lain, tanpa adanya prinsip etika, semua upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik akan terjebak dalam kesulitan untuk mencapai tujuannya, meskipun konsep tersebut telah direncanakan dan disusun dengan sangat baik. Berbagai hambatan yang timbul dalam pengelolaan pemerintahan, seperti tingginya angka korupsi dan beberapa masalah lainnya, menunjukkan rendahnya nilai-nilai etika yang dimiliki oleh para pegawai. Tanpa penerapan prinsip etika yang kuat, pelaksanaan integritas publik tidak akan terlaksana dengan efisien.

## Metode

Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (studi literatur). Penelitian kepustakaan merupakan pendekatan yang diterapkan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara memanfaatkan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Metode ini berguna untuk mendukung penelitian dengan referensi yang valid dan relevan (Zed, 2004). Metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan untuk memahami, menyimpulkan, dan mengkritisi perkembangan pengetahuan tentang suatu topik. Studi kepustakaan berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data atau informasi dari berbagai literatur terkait suatu topik atau masalah penelitian yang bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan teori atau konsep berdasarkan referensi yang telah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi pencarian literatur, seleksi literatur yang relevan dengan topik, serta pengumpulan data melalui proses membaca, mencatat, dan mengutip, yang kemudian disajikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema dan tujuan penelitian, yakni bagaimana penerapan etika administrasi dapat berpengaruh terhadap integritas publik dari publikasi artikel jurnal terkait 10 tahun terakhir.

## Hasil dan Pembahasan

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang mengacu pada kebiasaan atau karakter, sedangkan istilah moral berasal dari bahasa Latin *mos/mores*, yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Istilah ini terus berkembang dan menghasilkan kata-kata baru seperti *morale* atau *moril*, tetapi maknanya telah beralih dari definisi awalnya. Sebagai contoh, istilah moril sering kali dipahami sebagai dorongan dari dalam diri. Istilah lain yang terkait dengan etika adalah norma, yang berarti sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat ukur. Kemudian istilah ini diadopsi dalam bahasa Inggris dengan arti sekumpulan aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia. Oleh karena itu, norma berfungsi sebagai pedoman atau arah bagi perilaku manusia, menjelaskan apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan atau dihindari dalam interaksi dengan orang lain.

Secara umum, etika sering dihubungkan dengan birokrasi karena sebagai individu dalam administrasi publik, terdapat kekuasaan dan pengambilan keputusan. Keputusan yang

dibuat atau tidak dibuat dapat berdampak pada kondisi masyarakat secara keseluruhan. Etika selalu berhubungan dengan nilai-nilai terkait benar atau salah dari suatu tindakan, serta baik dan buruknya motif dan tujuan dari tindakan tersebut, serta aspek yang mengatur perilaku manusia. Setiap individu dalam administrasi publik harus menunjukkan perilaku dan sikap mental yang mencerminkan nilai-nilai etika dan mampu memahami, merasakan, dan menerapkan berbagai nilai etika yang sesuai dengan posisinya. Oleh karena itu, pemahaman tentang nilai-nilai etika sangat penting bagi setiap pejabat publik untuk dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya, menurut pandangan Darwin dalam (Widodo, 2001) etika dalam administrasi publik merupakan sekumpulan nilai yang berfungsi sebagai panduan bagi tindakan dalam organisasi. Beragam aktivitas dalam administrasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga evaluasi, memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai teori organisasi. Proses administrasi publik adalah suatu usaha yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas teknis tetapi juga politik yang berupaya menerjemahkan kehendak publik menjadi kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika saat menentukan kebijakan, karena setiap proses dalam administrasi publik secara konsisten menuntut tanggung jawab etis.

Administrasi publik merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kesuksesan pembangunan. Beragam kegiatan dalam administrasi publik, seperti penyediaan layanan publik berkualitas, dapat mendatangkan kesejahteraan dan kepuasan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian dan mendahulukan nilai-nilai etika saat memenuhi aspirasi serta kepentingan masyarakat yang dilayani. Tindakan pegawai negeri mencerminkan sikap mereka ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, yang pada gilirannya dapat memengaruhi mutu layanan publik. Penerapan etika dalam pelayanan publik sangat penting, yang terlihat melalui sikap disiplin, kepatuhan terhadap peraturan, serta keramahan dalam memberikan layanan kepada warga. Namun, saat ini, layanan publik belum berjalan dengan efektif dan tidak sepenuhnya memenuhi harapan publik. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya keluhan yang dihadapi oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan layanan oleh pemerintah, baik dalam aspek prosedur, transparansi, maupun interaksi petugas saat memberikan pelayanan. Saat ini, salah satu tantangan dalam administrasi publik yang masih ada adalah pelanggaran etika. Ini menyebabkan masyarakat mulai meragukan kapasitas pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas. Mengingat hal itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masih terdapat keluhan masyarakat terkait berbagai masalah dalam layanan publik, seperti praktik pungutan liar dan ketidakmerataan dalam penyampaian layanan.

Etika dalam administrasi publik serta integritas publik merupakan dua elemen kunci yang mendasari penciptaan sistem pemerintahan yang baik. Dalam ranah administrasi publik, etika berperan sebagai pedoman yang memberikan arah kepada tindakan, pilihan, dan perilaku pegawai negeri, sehingga sejalan dengan nilai moral dan prinsip keadilan. Sementara itu, integritas publik mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai tersebut dengan tindakan aktual yang dilakukan oleh individu atau lembaga saat melaksanakan kewajiban publik. Keduanya saling berhubungan dan saling memperkuat, di mana etika memberi

landasan filosofis untuk pengambilan keputusan yang etis, sementara integritas memastikan bahwa nilai-nilai tersebut direalisasikan dengan konsisten dalam praktik sehari-hari.

Etika dalam administrasi publik, sebagai elemen dari etika sosial, memiliki keterkaitan yang kuat dengan etika profesional, etika dalam ranah politik, etika yang berkaitan dengan lingkungan, etika dalam konteks keluarga, serta sikap terhadap orang lain, termasuk respons terhadap kritik ideologi, sebagaimana yang digambarkan di bawah ini.

Gambar 1. Etika Administrasi Publik Sebagai Bagian Etika Sosial



Sumber: (Kumorotomo, 1992)

Dalam konteks kehidupan bernegara, penerapan etika di bidang administrasi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Cooper, 2012) mengemukakan bahwa etika administrasi publik lebih dari sekadar mematuhi hukum; etika juga mencakup tanggung jawab moral yang dimiliki oleh pejabat publik untuk melayani kepentingan masyarakat dengan adil dan transparan. Saat etika diterapkan dalam proses administrasi, pengambilan keputusan tidak hanya terfokus pada kepatuhan hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kepentingan publik. Ini akhirnya akan mendukung terbentuknya integritas publik yang menjadi tolak ukur utama dari pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Integritas publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik administrasi publik yang etis. (Huberts, 2014) menyatakan bahwa integritas publik adalah karakter moral yang menunjukkan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua tindakan pejabat publik. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan seperti pengadaan barang dan jasa, integritas publik terlihat dari sejauh mana proses dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanpa adanya konflik kepentingan. Ketika pejabat publik mengikuti prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan, maka integritas mereka akan semakin terjamin. Dalam hal ini, etika administrasi publik berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa integritas publik tetap terjaga meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah.

Namun, interaksi antara etika dalam administrasi publik dengan integritas publik tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai tantangan, seperti korupsi, pengaruh politik, dan lemahnya pengawasan, sering kali menjadi hambatan utama dalam penerapan etika di administrasi publik. Korupsi, contohnya, adalah masalah yang sangat merusak integritas publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik korupsi umumnya terjadi saat pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok

tertentu. Hal ini tidak hanya merusak prinsip-prinsip etika dalam administrasi publik, tetapi juga mengancam integritas lembaga-lembaga pemerintah secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, penerapan etika administrasi publik menjadi sangat krusial untuk memulihkan integritas publik yang telah ternoda.

Etika dalam administrasi publik mengacu pada norma-norma moral yang memandu tingkah laku para pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas mereka. Etika ini memberikan pedoman agar setiap langkah yang diambil pegawai pemerintah selaras dengan nilai-nilai moral dan kepentingan publik. Konsep ini mencakup tanggung jawab untuk berbuat dengan akuntabilitas, keterbukaan, keadilan, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, integritas publik mencerminkan konsistensi antara tindakannya dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh pegawai publik. Pegawai yang memiliki integritas tinggi tidak hanya mematuhi peraturan dan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang lebih luas. Integritas ini mencakup kejujuran dalam menjalankan tugas, menjauhi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga profesionalisme di setiap aspek pekerjaan. Dengan demikian, integritas publik menjadi faktor vital dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hubungan antara etika dalam administrasi publik dan integritas publik sangat terkait. Etika administrasi publik menyediakan kerangka nilai yang menjadi pedoman bagi pegawai pemerintah, sementara integritas publik merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Tanpa adanya etika yang kuat, sulit untuk membangun integritas publik, dan tanpa integritas, pelaksanaan etika hanya akan menjadi sekedar formalitas. Hubungan ini bersifat saling mempengaruhi, di mana penerapan etika yang konsisten dapat memperkuat budaya integritas, sementara integritas yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam administrasi publik.

Pengaruh politik juga merupakan tantangan besar dalam membangun koneksi antara etika administrasi publik dan integritas publik. Dalam beberapa situasi, pejabat publik mungkin terpaksa membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika akibat adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan politik. Misalnya, keputusan yang diambil untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan umum sering kali mencerminkan rendahnya integritas publik. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari para pejabat publik untuk mempertahankan nilai-nilai etika meskipun harus menghadapi tekanan politik yang signifikan.

Rendahnya kesadaran akan etika di kalangan pegawai negeri juga menjadi penghalang dalam penerapan etika administrasi publik dan penguatan integritas publik. Banyak pejabat publik yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya etika dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan mereka. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai etika administrasi publik. Padahal, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pegawai negeri tentang prinsip-prinsip etika dan dampaknya terhadap integritas publik. Selain itu, pelatihan dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dalam mengenali dan menangani dilema etika yang mungkin muncul dalam pekerjaan sehari-hari mereka.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dalam memperkuat interaksi antara etika administrasi publik dan integritas publik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat peraturan yang menetapkan standar etika dalam administrasi publik. Peraturan yang jelas dan tegas dapat menjadi panduan bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip etika. Di Indonesia, Contohnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum yang mengatur prinsip etika yang harus diadopsi oleh pejabat publik. Peraturan semacam itu tidak hanya menetapkan standar perilaku, tetapi juga menyediakan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika diterapkan dalam praktik administrasi. Selain dari peraturan, pendidikan dan pelatihan mengenai etika administrasi publik juga harus menjadi fokus utama. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pejabat publik terhadap pentingnya etika dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam pelatihan ini, pegawai negeri dapat mempelajari prinsip etika yang relevan dengan tugas mereka serta cara menerapkan prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika, para pejabat publik akan lebih siap menghadapi tantangan etika dan membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai moral. Pengawasan yang efisien juga merupakan langkah krusial dalam memastikan penerapan nilai-nilai etika yang konsisten dalam administrasi publik. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kekuasaan untuk melakukan audit dan mengevaluasi kinerja pejabat publik. Dengan pengawasan yang ketat, pelanggaran etika dapat dikurangi, sehingga integritas publik dapat terjaga. Lebih jauh, pengawasan juga memberikan umpan balik yang berharga bagi pejabat publik untuk meningkatkan kinerja mereka.

Menurut (Widodo, 2001) etika berfungsi ganda, yang pertama sebagai pedoman dan referensi untuk administrator publik dalam melaksanakan tugas dan kekuasaan mereka; kedua, etika administrasi publik (etika birokrasi) berfungsi sebagai ukuran untuk menilai perilaku dan tindakan administrator publik. Kepemimpinan yang berlandaskan etika memiliki kontribusi penting dalam menciptakan hubungan antara etika administrasi publik dan integritas publik. Pemimpin yang menganut nilai-nilai etika dapat menjadi teladan yang positif bagi bawahannya. Saat seorang pemimpin menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai etika, ini akan memotivasi pejabat publik lainnya untuk meneladani sikap tersebut. Selain itu, pemimpin yang beretika dapat membangun budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip etika, sehingga integritas publik dapat terwujud dengan lebih efektif.

Menurut (Frederickson, H. George & Ghore, 2005) etika ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Ketika pejabat publik bertindak sesuai dengan standar etika, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Integritas, di sisi lain, adalah tentang konsistensi antara kata-kata dan tindakan, serta keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Hal ini penting dalam menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, di mana integritas menjadi fondasi bagi hubungan yang sehat.

Keterkaitan antara etika administrasi publik dan integritas publik juga dapat diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap penerapan etika administrasi publik

lewat kebijakan dan program yang mendukung nilai-nilai etika. Sementara itu, masyarakat dan organisasi non-pemerintah dapat bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika diterapkan secara konsisten. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antara etika administrasi publik dan integritas publik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam jangka panjang, membangun keterkaitan yang solid antara etika administrasi publik dan integritas publik memerlukan komitmen dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu berkolaborasi untuk menciptakan suasana yang mendukung penerapan nilai-nilai etika dalam administrasi publik. Dengan demikian, diharapkan keterkaitan antara etika administrasi publik dan integritas publik dapat terus diperkuat, sehingga menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan etika serta integritas dalam sektor administrasi publik memerlukan komitmen yang mendalam dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan mengenai etika merupakan langkah awal untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang betapa pentingnya nilai-nilai moral dalam aktivitas mereka. Di samping itu, penerapan kode etik yang jelas dan kuat sangat penting untuk memberikan pedoman yang nyata dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal dengan baik juga sangat diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip etika dan integritas yang sejati. Selain itu, memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan integritas tinggi serta sanksi bagi yang melanggar etika dapat menjadi metode yang efektif dalam membangun budaya etika dan integritas dalam lembaga pemerintahan.

Pelaksanaan etika dan integritas dalam administrasi publik sangat krusial untuk membangun pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tetap terjaga, dan tujuan pelayanan publik dapat dicapai dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, etika dan integritas seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segala aspek administrasi publik.

## Simpulan

Etika dalam administrasi publik dan integritas publik merupakan dua elemen yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memegang peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Dengan penerapan prinsip-prinsip etika serta pemeliharaan integritas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tetap terjaga, sehingga tujuan pelaksanaan layanan publik dapat terealisasi secara maksimal. Berbagai permasalahan yang muncul dalam usaha mencapai tata kelola yang efektif mengindikasikan bahwa etika dalam administrasi publik sedang mengalami kemunduran, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Situasi ini disebabkan oleh sekelompok individu yang tidak bertanggung jawab atas tugas dan peran yang diemban. Isu-isu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain muncul sebagai akibat kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai etika oleh pegawai saat menjalankan tugas mereka. Hal ini berpotensi membahayakan kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, perlu dilakukan peningkatan kualitas

sumber daya manusia melalui perbaikan perilaku pegawai dan penanaman nilai-nilai etika. Ini sangat penting dilakukan agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terimplementasi dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Menciptakan sistem pemerintahan yang efisien tentu bukanlah sesuatu yang sederhana. Diperlukan dedikasi dari semua pihak, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat. Pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan administrasi publik berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan sangat krusial bagi setiap orang untuk memahami seberapa pentingnya prinsip-prinsip etika ketika menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Secara menyeluruh, keterkaitan antara etika dalam administrasi dan integritas publik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif serta akuntabel. Integritas bukan hanya berfokus pada keseimbangan internal tetapi juga membangun kepercayaan serta kredibilitas di kalangan publik. Maka dari itu, upaya untuk memperkuat praktik etis dalam administrasi publik harus menjadi perhatian utama bagi semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan pembangunan nasional dan tata kelola pemerintah yang baik.

## Referensi

- Andersson, S., & Heywood, P. M. (2009). The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption. *Political Studies*, 57(4), 746–767. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00758.x>
- Baird, I. G. (2016). Non-government Organizations, Villagers, Political Culture and the Lower Sesan 2 Dam in Northeastern Cambodia. *Critical Asian Studies*, 48(2). <https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1157958>
- Cooper, T. L. (2012). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role*. Jossey-Bass.
- Frederickson, H. George & Ghere, R. K. (2005). *Ethics in Public Administration*. Routledge.
- Housego, A., & O'Brien, T. (2012). Delivery of Public Services by Non-Government Organisations. *Australian Journal of Public Administration*, 71(2). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2012.00765.x>
- Huberts, L. W. J. C. (2014). *The Integrity of Governance: What It Is, What We Know, What Is Done, and Where to Go*. Palgrave Macmillan.
- Jain, A. K. (2001). The Political Economy of Corruption. In A. K. Jain (Ed.), *The Political Economy of Corruption*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203468388>
- Kumorotomo, W. (1992). *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafinda Persada.
- May Ng, S., Malene, I. V., Nilar, M., Rassavong, K., Dung Vu, C., Hui Sieng Tan, F., Yazid Jalaludin, M., Toomey, C., & Lek, N. (2022). Closing the Type 1 Diabetes gap in South-East Asia through government partnership working with non-government organisations. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 187.

- MVUNABANDI, J. D. (2023). Effectiveness of Forensic Auditing on Fighting Fraud Among Non-Government Organisations in South Africa. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(3). <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i3.388>
- Nguyen, T. V., Bach, T. N., Le, T. Q., & Le, C. Q. (2017). Local governance, corruption, and public service quality: evidence from a national survey in Vietnam. *International Journal of Public Sector Management*, 30(2), 137–153. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2016-0128>
- Onwujekwe, O., Agwu, P., Orjiakor, C., McKee, M., Hutchinson, E., Mbachu, C., Odii, A., Ogbozor, P., Obi, U., Ichoku, H., & Balabanova, D. (2019). Corruption in Anglophone West Africa health systems: a systematic review of its different variants and the factors that sustain them. *Health Policy and Planning*, 34(7), 529–543. <https://doi.org/10.1093/heapol/czz070>
- Overend, C. (2015). *Anti-corruption legislation and government transparency in Europe*. University of Malta. <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/9356>
- Owusu, E. K., Chan, A. P. C., & Shan, M. (2019). Causal Factors of Corruption in Construction Project Management: An Overview. *Science and Engineering Ethics*, 25(1), 1–31. <https://doi.org/10.1007/s11948-017-0002-4>
- Santoso, R., Murdiono, M., Muhson, A., & Nadya, L. (2024). The quality of anti-corruption education in Indonesian schools: adaptation of the Servqual method. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 13(4), 2482. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i4.28150>
- Tanny, T. F., & Al-Hossienie, C. A. (2019). Trust in government: Factors affecting public trust and distrust. *Jahangirnagar Journal of Administrative Studies, Department of Public Administration*, 12, 52. [https://www.researchgate.net/profile/Tahmina-Tanny/publication/340446184\\_Trust\\_in\\_Government\\_Factors\\_Affecting\\_Public\\_Trust\\_and\\_Distrust/links/5ebd7e70299bf1c09abc0578/Trust-in-Government-Factors-Affecting-Public-Trust-and-Distrust.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Tahmina-Tanny/publication/340446184_Trust_in_Government_Factors_Affecting_Public_Trust_and_Distrust/links/5ebd7e70299bf1c09abc0578/Trust-in-Government-Factors-Affecting-Public-Trust-and-Distrust.pdf)
- Truong, H. T. (2020). Corruption impacting regional economic growth: A dynamic panel data analysis for the case of Vietnam. *Pacific Economic Review*, 25(5), 601–619. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12339>
- Tweedie, D., & Luzia, K. (2023). In place, with power: (Re)conceptualising accountability in national non-government organisations. *Critical Perspectives on Accounting*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102536>
- UNEP. (2018). Plastics: A Roadmap for Sustainability. In *Single-use Plastic: A Roadmap for Sustainability*.

- Widodo, J. (2001). *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Woessmann, L. (2016). The Importance of School Systems: Evidence from International Differences in Student Achievement. *Journal of Economic Perspectives*, 30(3), 3–32. <https://doi.org/10.1257/jep.30.3.3>
- Zakaria, A., & Zaharrudin, N. Z. (2020). Alternative-based funding model and resource dependency theory: Perspectives of malaysian non-government organisations. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 24(S1).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.